

**TESIS**

**POLITIK HUKUM PENGALIHAN  
KEWENANGAN PERIZINAN  
PERTAMBANGAN**



Oleh:

**AKHMAD SARIPUDIN**

**NIM. 2320215310160**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**POLITIK HUKUM PENGALIHAN  
KEWENANGAN PERIZINAN  
PERTAMBANGAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh:

**AKHMAD SARIPUDIN  
NIM. 2320215310160**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis** : POLITIK HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN  
PERIZINAN PERTAMBANGAN  
**Nama** : AKHMAD SARIPUDIN  
**NIM** : 2320215310160

Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418 198603 1 002

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus : 14 Juli 2025

Tanggal Wisuda :

Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 14 Juli 2025

Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418 198603 1 002

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum

  


Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan**

**Di Depan**

**Sidang Panitia Penguji Tesis**

**Pada Tanggal 14 Juli 2025**

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua** : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

**Sekretaris** : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

**Anggota** : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

## MOTTO/PERSEMBAHAN

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, jika kamu dapat mengerjakannya hari ini.

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas suatu nikmat.

dan

Karya ini juga saya persembahkan kepada Alm. Ayah saya dan Ibu saya sebagai bentuk tanggungjawab atas amanah dan bimbingan sekaligus doa yang telah diberikan sampai saat ini.

Serta

Karya ini juga saya persembahkan kepada saudara saya “Muhammad Ridha Ramadhan, Muhammad Khatami Anwari, Hans Reyner Edison Sianturi dan Daniel Thomas” yang sangat berperan sekali dalam arahan dan masukan sekaligus *Support System* yang penulis dapatkan dari saudara-saudara seperti mereka. Saya tidak akan melupakan perjuangan kita.

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Saripudin

NIM : 2320215310160

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan  
Pertambangan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Akhmad Saripudin

**SARIPUDIN, AKHMAD. 2025. POLITIK HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.HUM.**

## **RINGKASAN**

Sektor pertambangan mineral dan batubara memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan daerah. Sejak diberlakukannya UU No. 3/2020 yang mengalihkan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, muncul perdebatan mengenai rasionalitas politik hukum di balik kebijakan tersebut, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi praktik korupsi, dan mendorong investasi terstruktur, tetapi berpotensi mengabaikan semangat otonomi daerah, hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi politik hukum ketentuan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan serta menganalisis rasio logis di balik penyerahan kewenangan itu kepada pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe deskriptif-analitis, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 3/2020, UU 23/2014, PP No. 96/2021, dan Perpres No. 55/2022 serta putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur akademik terkait politik hukum dan otonomi daerah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menerapkan teori politik hukum, teori otonomi daerah, dan teori perizinan untuk menilai kesesuaian kebijakan pengalihan kewenangan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Temuan pertama menunjukkan bahwa perubahan kewenangan perizinan pertambangan dalam UU No. 3/2020 mencerminkan pergeseran politik hukum dari model desentralisasi atribusi di mana provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang asli menerbitkan IUP dan IPR menuju model sentralisasi delegasi yang menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas utama. Meskipun delegasi terbatas kepada provinsi dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur, memperkuat pengawasan, dan menjamin kepastian hukum melalui sistem perizinan online terintegrasi, langkah ini mengikis esensi otonomi daerah sesuai

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan UU 23/2014, mengurangi peran kabupaten/kota, serta menimbulkan risiko konflik kepentingan, tumpang tindih kebijakan, dan minimnya partisipasi publik.

Temuan kedua mengungkapkan bahwa rasio logis pengalihan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat didasari kebutuhan untuk menciptakan standarisasi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara nasional. Dengan memusatkan keputusan strategis mulai dari penetapan kebijakan, standar perizinan, hingga pengawasan pemerintah pusat dapat meminimalkan disparitas interpretasi dan praktik korupsi, sementara pendelegasian terbatas kepada provinsi untuk aspek teknis operasional (pemberian sertifikat standar, IUP, IPR, pembinaan, dan pengawasan lapangan) tetap mempertahankan responsivitas lokal. Mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala dalam Perpres No. 55/2022 memperkuat komitmen pusat untuk membina dan mengoreksi pelaksanaan di daerah, sehingga sistem perizinan menjadi terintegrasi, transparan, dan mendukung optimalisasi nilai tambah nasional.

**SARIPUDIN, AKHMAD. 2025. POLITIK HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.HUM.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Politik Hukum, Pertambangan, Otonomi Daerah, Perizinan, Pengalihan Kewenang**

Penelitian ini membahas dinamika kebijakan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.

**SARIPUDIN, AKHMAD. 2025. *LEGAL POLITICS OF DELEGATION OF MINING LICENSING AUTHORITY. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.HUM.***

### **ABSTRACT**

***Keywords: Legal Politics, Mining, Regional Autonomy, Licensing, Authority Transfer***

*This research discusses the dynamics of the policy on the transfer of mining permit authority from regional to central government based on Law Number 3 of 2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The main objective is to analyze the rationality and legal politics implications of this transfer policy in the context of regional autonomy, legal certainty, environmental protection, and local economic impact.*

*This study applies a normative juridical approach with data collected through literature study. The data were qualitatively analyzed based on relevant laws, legal documents, and academic literature.*

*The research results indicate that the transfer of mining licensing authority to the central government has a strong legal foundation and aims to improve regulatory effectiveness and attract better investment. However, the policy also raises several issues, such as the diminished role and revenue of regional governments, weakened environmental oversight, and potential conflicts with the principle of regional autonomy. Therefore, policy evaluation and reformulation are necessary to maintain a fair and sustainable balance between national and local interests.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan”. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Kedua orang tua Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis.

7. Saudaraku yang selalu memberi semangat dalam suka dan duka “Muhammad Ridha Ramadhan, Muhammad Khatami Anwari, Hans Reyner Edison Sianturi dan Daniel Thomas” saya ucapkan terimakasih.
8. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan Rekan-rekan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan mudah–mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah SWT, dengan balasan berlipat ganda dan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Banjarmasin, 05 Juli 2025

Penyusun

Akhmad Saripudin

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Peneliti .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	37
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	44
BAB II POLITIK HUKUM KETENTUAN PENGALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN .....	46
A. Perkembangan Pengaturan Kewenangan Perizinan Pertambangan di Indonesia.....	46
B. Arah Politik Hukum dalam Pengalihan Kewenangan Pertambahan pada UUD 1945 .....	66
C. Konsep Ideal Kewenangan Perizinan Pertambangan di Indonesia .....	80
BAB III RASIO LOGIS KETENTUAN PENGALIHAN KEWENANGAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA YANG MENJADI KEWENANGAN PUSAT .....	86
A. Prinsip-Prinsip Dalam Kewenangan Perizinan Pertambangan .	86
B. Dasar Pemikiran Undang-Undang yang Menetapkan Kewenangan Pertambangan ke Pemerintah Pusat.....	91
C. Keberadaan Konsep Desentralisasi dalam perihal Kewenangan Perizinan Pertambangan .....	93

BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Perbandingan Dampak Pola Perizinan Pusat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	78
---	----